



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. RISMAN S.D.S.
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 11024

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 576.609.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/110 m2 di KOTA PADANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/72 m2 di KOTA PADANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/21 m2 di KOTA PADANG ,
WARISAN Rp. 26.609.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 149.827.000**

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T Tahun 2014,
HASIL SENDIRI Rp. 132.827.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 102.875.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 39.499.025****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 868.810.025****III. HUTANG** **Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 868.810.025**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.